

**PT IBU YANG MEMPERDAGANGKAN BERAS TIDAK SESUAI DENGAN
SERTIFIKAT STANDAR NASIONAL INDONESIA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG STANDARDISASI
DAN PENILAIAN KESESUAIAN**

Nama: Doni Fanni Septyandi Terok

Jurusan/Program Studi: Hukum/Ilmu Hukum

Pembimbing: 1. Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M.

2. Dr. Hwian Christianto, S.H., M.H.

ABSTRAK

Seperti diketahui, Indonesia merupakan negara berkembang yang berupaya melaksanakan pembangunan nasional dalam berbagai aspek kehidupan manusia, salah satunya adalah aspek pangan. salah satu makanan pokok dan Utama adalah beras yang dikonsumsi sehari-hari oleh manusia karena itu harus memiliki kualitas yang baik dan aman untuk dikonsumsi. Sehingga penerapan Peraturan Standar Nasional Indonesia tentang produk beras sangat diperlukan untuk melindungi keamanan dan keselamatan konsumen. Tujuan penggunaan beras berlabel SNI adalah untuk memberikan jaminan kualitas dan harga kepada konsumen, serta meningkatkan nilai bagi pelaku usaha di Indonesia. Beras di pasaran umumnya sudah diberi label, tetapi tidak sesuai dengan persyaratan aturan sistem pelabelan produk makanan. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan arus globalisasi yang tidak lagi terbendung, tidak hanya menimbulkan dampak positif tetapi juga sering menimbulkan dampak negatif, misalnya dengan adanya "globalisasi kejahatan" dan perkembangan kualitas (modus operandi) dan kuantitas tindak pidana oleh korporasi. Seperti diketahui, sebuah korporasi selalu menginginkan keuntungan lebih dengan menurunkan kualitas suatu produk beras ketika telah mendapat kepercayaan dari konsumen dan tidak sesuai dengan sertifikat SNI yang dimiliki oleh pelaku usaha. Tindakan korporasi merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2014 Tentang Standardisasi dan penilaian kesesuaian yang telah mengakui Korporasi sebagai subjek hukum pidana.

**PT IBU YANG MEMPERDAGANGKAN BERAS TIDAK SESUAI DENGAN
SERTIFIKAT STANDAR NASIONAL INDONESIA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG STANDARDISASI
DAN PENILAIAN KESESUAIAN**

Name: Doni Fanni Septyandi Terok

Discipline/ Study Programme: Law/Law

Contributor : 1. Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M.

2. Dr. Hwian Christianto, S.H., M.H.

ABSTRACT

Indonesia is a developing country that seeks to implement national development in various aspects of human life, one of which is the food aspect. One of the staple foods is rice which is consumed daily by Indonesian people. Therefore, it must be of good quality and safe for consumption. Thus, the application of the Indonesian National Standard Regulations regarding rice products is very important to protect the safety and security of consumers. The purpose of using SNI labeled rice is to provide quality and price assurance to consumers, as well as increase the value for business actors in Indonesia. The rice sold in the market has commonly been labeled, but it does not comply with the regulatory requirements of the food product labeling system. This is influenced by the development of science and technology and the unstoppable flow of globalization. It does not only have a positive impact but also have a negative impact, for example with the "globalization of crime" and the development of the quality (modus operandi) and quantity of corporate crime. A company always wants more profit by lowering the quality of a rice product when it has won the trust of consumers. The product is no longer in accordance with the SNI certificate held by business actors. This corporate action is a criminal act as regulated in Law Number 20 of 2014 concerning Standardization, and the conformity assessment has recognized the Corporation as a subject of criminal law.